

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS  
NOMOR 102/ITJ.1/TU.140/IV/2026

Yth. : Inspektur Jenderal  
Dari : Inspektur I  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Capaian Kinerja Inspektorat I Periode Triwulan I Tahun 2026  
Tanggal : 16 April 2026

Bersama ini kami melaporkan kepada Bapak, bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memandatkan untuk dilakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala (Triwulan).

Sehubungan hal tersebut, Inspektorat I telah melakukan pengukuran kinerja periode Triwulan I Tahun 2026 melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>). Pengukuran dilakukan terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja dan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,08% atau kategori "Baik". Uraian terhadap hasil pengukuran masing-masing indikator kinerja secara rinci kami sampaikan melalui Laporan Kinerja Inspektorat I sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:  
Sekretaris Inspektorat Jenderal

# **LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I INSPEKTORAT JENDERAL KKP PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2026**

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, diketahui bahwa Inspektorat I memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi serta Pusat Kebijakan Strategis dan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Pengelolaan Kelautan, serta Pusat Data dan Informasi. Sehubungan hal tersebut Inspektorat I mempunyai peran strategis dalam mengawal program/kegiatan mitra kerja dalam mendukung pencapaian terhadap program 5 kebijakan ekonomi biru yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, 3 dari 5 kebijakan tersebut merupakan program/kegiatan yang dijalankan oleh mitra kerja Inspektorat I yaitu pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Adapun program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab mitra kerja Inspektorat I adalah program/kegiatan perluasan kawasan konservasi laut, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta penanganan sampah plastik di laut melalui Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH). Selain hal tersebut, Inspektorat I juga melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal KKP yang memiliki tugas fungsi sebagai dukungan manajerial mulai dari perencanaan hingga pelaporan, pelaksanaan pengawasan terhadap program nasional yaitu swasembada garam nasional.

Dalam rangka mengawal program/kegiatan mitra kerja, Inspektorat I menghadapi beberapa tantangan (*strategic issues*) diantaranya adalah: 1) adanya perubahan kebijakan terkait efisiensi anggaran, sehingga hasil pengawasan belum memberikan jaminan secara maksimal berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan di lapangan; 2) keterbatasan SDM Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagai pelaksana yang mengawal setiap pelaksanaan program/kegiatan mitra kerja. Menghadapi tantangan tersebut, Inspektorat I selalu berupaya untuk memberikan pendampingan/pengawalan semaksimal mungkin terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, mulai dengan menyusun program pengawasan melalui pendekatan penilaian risiko atas program/kegiatan yang telah ditetapkan, selain hal tersebut dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat I telah

memanfaatkan peran teknologi informasi dengan melakukan pengawasan secara online terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada mitra kerja.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat I sebagai *quality assurance* maupun *consulting partner* terhadap mitra kerjanya perlu menyusun rencana kinerja dalam rangka mengawal program/kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kementerian. Dalam hal ini, Inspektorat I merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal KKP telah menetapkan rencana kinerja yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai target strategis dan operasional antara Inspektur Jenderal dengan Inspektur I sebagai pimpinan unit kerja. Adapun tujuan ditetapkannya PK tersebut adalah sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai alat monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan kinerja bagi penerima amanah.

Kinerja Tahun 2026 lingkup Inspektorat I, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja dengan penetapan target pada masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana pada tabel berikut.

| Sasaran Kegiatan |                                                                                                 | Indikator Kinerja |                                                                                                                          | Target |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                | Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I | 1                 | Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)                                       | ≤ 0,5  |
|                  |                                                                                                 | 2                 | Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)                                              | 86,5   |
|                  |                                                                                                 | 3                 | Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%) | 86     |
|                  |                                                                                                 | 4                 | Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)                                         | 4      |
| 2                | Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I                    | 5                 | Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)                                                                         | 85,5   |
|                  |                                                                                                 | 6                 | Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)                                  | 82     |
|                  |                                                                                                 | 7                 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)                                             | 100    |

Berdasarkan PK tersebut, Inspektorat I mempunyai kewajiban untuk melakukan pengukuran secara periodik terhadap target pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan serta melaporkannya kepada pimpinan unit kerja Eselon I. Selain hal itu, Inspektorat I juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian atas Rencana Aksi

(Renaksi) sebagai bentuk strategi dalam rangka mencapai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja pada laman <https://kinerjaku.kkp.go.id/> diketahui bahwa Inspektorat I pada periode Triwulan I Tahun 2026 memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,08% atau kategori “Baik”. Nilai tersebut diperoleh dari nilai Sasaran Kinerja sebagai berikut:

- 1) SK.01 “Pengawasan Intern Yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I” dengan capaian 104,16%;
- 2) SK.02 “Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I” dengan capaian 100%.

Capaian Sasaran Kinerja tersebut diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja yang menjadi target pengukuran periode Triwulan I Tahun 2026. Adapun penjelasan terhadap hasil pengukuran indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1) IKSK.01.1 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%).

Pengukuran pada indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah nilai temuan keuangan (nilai Tuntutan Ganti Rugi) dari hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Unit Eselon I (mitra) Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2025 (mitra).

*(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode Tahunan (pada Triwulan III) -----).*

- 2) IKSK.01.2 Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%).

Persentase implementasi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan indikator yang mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi lingkup Unit Eselon I berdasarkan persentase realisasi rencana aksi RB Unit Eselon I yang telah ditetapkan.

*(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode Semesteran (pada Triwulan II dan IV) -----).*

- 3) IKSK.01.3 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%).

Pengukuran capaian Indikator Kinerja ini diperoleh dengan membandingkan antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara tuntas terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2026 (Triwulan IV 2025), adapun hasil pengukuran terhadap persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sebesar 89,58% (tuntas 129 dari 144 rekomendasi) atau nilai capaiannya sebesar 104,16%. Nilai persentase jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86,00%, dengan uraian:

- a. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Sekretariat Jenderal KKP yaitu dari 18 LHP dengan 39 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti seluruhnya atau sebanyak 39 rekomendasi telah berstatus TUNTAS dengan capaian 100%;
- b. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yaitu dari 45 LHP dengan 103 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 88 rekomendasi dengan status TUNTAS atau capaiannya sebesar 85,44%, dan masih terdapat sisa sebanyak 15 (lima belas) rekomendasi belum dinyatakan tuntas;
- c. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yaitu dari 2 LHP dengan 2 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 3 rekomendasi dengan status TUNTAS atau capaiannya sebesar 100%.

Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Triwulan IV Tahun 2025) yaitu sebesar 106,66% dan periode Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 107,61%, data perkembangan capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja                                                                                                    | Triwulan I Tahun 2025 |           |         | Triwulan IV Tahun 2025 |           |         | Triwulan I Tahun 2026 |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|---------|
|                                                                                                                      | Target                | Realisasi | Capaian | Target                 | Realisasi | Capaian | Target                | Realisasi | Capaian |
| Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I | 85%                   | 91,47%    | 107,61% | 85%                    | 90,66%    | 106,66% | 86%                   | 89,58%    | 104,16% |

Penurunan capaian pada Indikator Kinerja ini disebabkan adanya kenaikan target di Tahun 2026 menjadi 86% jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yaitu 85%. Selain hal tersebut, terdapat rekomendasi hasil pengawasan periode Triwulan IV Tahun 2025 yang memerlukan waktu lebih lama dalam menindaklanjutinya sebagai dampak pemisahan organisasi Unit Kerja Eselon I yaitu Ditjen PKRL menjadi Ditjen PK dan Ditjen PRL.

Sebagai upaya percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal, Inspektorat I telah melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pada mitra kerja secara berkala (bulanan) melebihi dari target yang ditetapkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu secara Triwulanan. Selain hal tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi tindak lanjut (SIDAK) yang membantu menyediakan data hasil pengawasan serta upaya penyelesaian/tindak lanjut yang telah dilakukan mitra kerja secara update/real time.

- 4) IKSK.01.4 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi).

Rekomendasi kebijakan merupakan masukan/saran dari hasil kajian Itjen yang diberikan kepada mitra kerja dalam rangka penyempurnaan proses penyusunan/pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan pada tingkat kementerian/eselon I/eselon II.

*(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode Semesteran (pada Triwulan II dan IV) -----).*

- 5) IKSK.02.1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)

Telaah sejawat adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Inspektorat lain lingkup Itjen KKP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit sesuai dengan standar pengawasan intern.

*(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode Triwulan II -----).*

- 6) IKSK.02.2 Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%).

Merupakan sebuah ukuran dari implementasi pemanfaatan sistem informasi dalam membantu dan mendukung tugas pelaksanaan pengawasan intern oleh unit kerja lingkup Itjen KKP.

*(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode Semesteran (pada Triwulan II dan IV) -----).*

- 7) IKSK.02.3 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%).

Suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat dijalankan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran pada indikator kinerja ini diperoleh dari tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja dan anggaran melalui pemenuhan terhadap:

- a. Penyampaian dokumen kinerja pada e-Riviu SAKIP KemenPANRB;
- b. Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025;
- c. Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2025;
- d. Pengisian data rencana kinerja Tahun 2026 pada aplikasi pengelolaan kinerja;
- e. Tersedianya LPJ Keuangan Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2026;
- f. Rekapitulasi realisasi PKPT lingkup Inspektorat periode Triwulan I.

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh bahwa capaian kinerja sebesar 100% atau seluruh dokumen di atas telah dipenuhi oleh Inspektorat I secara tertib. Adapun perkembangan capaian kinerja jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Triwulan I Tahun 2025 serta Triwulan IV Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan (capaian kinerja stabil).

| Indikator Kinerja                                                                   | Triwulan I Tahun 2025 |           |         | Triwulan IV Tahun 2025 |           |         | Triwulan I Tahun 2026 |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|---------|
|                                                                                     | Target                | Realisasi | Capaian | Target                 | Realisasi | Capaian | Target                | Realisasi | Capaian |
| Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I | 100%                  | 100%      | 100%    | 100%                   | 100%      | 100%    | 100%                  | 100%      | 100%    |

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan secara tertib dan tepat waktu dalam hal:

- a. Pengisian dan penyampaian dokumen capaian kinerja pada aplikasi kinerjaku dan aplikasi e-Riviu SAKIP KemenPANRB serta pengisian realisasi kegiatan melalui aplikasi e-monev Bappenas;
- b. Penyampaian Laporan Kinerja/Data Capaian Kinerja (Triwulan);
- c. Pemantauan kepatuhan pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Penyusunan laporan evaluasi rencana aksi.

## B. Realisasi Anggaran

Untuk menjalankan pengawasan terhadap mitra kerja, Inspektorat I berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA\_032.02.1.622098/2026 tanggal 1 Desember 2025, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5.891.812.000,00. Berdasarkan Surat Sekretaris Itjen Nomor 1335/ITJ.0/RC.420/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 terdapat blokir anggaran sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8

Desember 2025, pemblokiran yang dilakukan adalah sebagai penguatan dukungan pelaksanaan program prioritas direktif Presiden Tahun 2026, hal ini berdampak terhadap besaran anggaran yang dikelola oleh Inspektorat I Tahun 2026 menjadi sebesar Rp4.768.909.000,00 atau terdapat blokir anggaran sebesar Rp1.122.903.000,00. Dari besaran anggaran efektif yang dikelola akan dipergunakan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap Program Prioritas Nasional/Strategis sebesar Rp4.439.698.000,00 dan Pengawasan Program Reformasi Birokrasi pada Mitra Inspektorat I sebesar Rp329.211.000,00.

Perkembangan realisasi anggaran sampai dengan Maret 2026 secara akrual sebesar Rp612.516.118,00 atau sebesar 12,84%, dengan sisa anggaran sebesar Rp4.156.392.882,00 atau sebesar 87,16% dari pagu efektif. Adapun rincian realisasi anggaran yaitu terdiri dari belanja bahan sebesar Rp20.453.500,00, belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp558.692.618,00 dan perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp22.370.000,00.

#### C. Capaian Rencana Aksi (Renaksi) Pencapaian Target Kinerja

Inspektorat I telah melakukan monitoring secara berkala terhadap Renaksi pencapaian target kinerja dimana pada periode Triwulan I Tahun 2026 diketahui terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang dijabarkan kedalam 15 kegiatan pendukung dengan 26 target/output yang harus dicapai. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa terhadap 26 target/output telah terealisasi sebanyak 23 target/output atau 88,46%, dimana terdapat 3 kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I, yang dijadwalkan 25 s.d. 31 Maret 2026, telah dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 10 April 2026, dikarenakan waktu pelaksanaan yang tidak efektif karena adanya Surat Edaran Menpan dan RB No.2 Th 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Raya Idul Fitri 1447 H (hasil evaluasi Renaksi periode Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran).

#### D. Kendala/Permasalahan dan Saran

Tidak terdapat kendala/permasalahan dalam mencapai target kinerja periode Triwulan I Tahun 2026, hal ini terlihat dari capaian kinerja yang melebihi dari target yang telah ditetapkan, meskipun mengalami penurunan secara Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari periode sama tahun 2025 yaitu 103,81% menurun menjadi 102,08%.

## BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, Inspektorat I memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,08% atau dengan kategori “Baik”, nilai kinerja ini diperoleh melalui pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja dengan hasil pengukuran adalah 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan nilai yang melebihi dari target kinerja dan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat I untuk selalu mencapai target yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan melakukan monitoring secara periodik, baik secara tatap muka maupun secara tertulis dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Inspektorat I selalu berupaya melakukan perbaikan dengan melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pengawasan salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi dalam membantu proses pengawasan dan pemantauan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Selain hal tersebut, Inspektorat I juga meningkatkan peran sebagai *consulting partner* dalam rangka mendeteksi awal adanya hambatan/penyimpangan pelaksanaan program/kegiatan mitra kerja, serta pelaksanaan pengawasan yang bersifat non PKPT dalam rangka memberikan pengawalan/pendampingan terhadap program/kegiatan mitra.

## BAB V. LAMPIRAN

Capaian kinerja yang merupakan hasil dari pengukuran kinerja tidak terlepas dari bukti dukung yang telah dikumpulkan untuk memperkuat capaian pada masing-masing indikator kinerja, adapun bukti dukung dimaksud disampaikan sebagai lampiran pada laporan kinerja ini sebagai berikut (bukti dukung dapat diunduh melalui laman: <https://bit.ly/4tiemgL>):

1. Perjanjian Kinerja Inspektur I;
2. Nota Dinas Inspektur I kepada Sekretaris Itjen Nomor 99/ITJ.1/HP.510/IV/2026 tanggal 11 April 2026 perihal Progres Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2026 pada Mitra Inspektorat I;
3. Nota Dinas Sekretaris Itjen Nomor 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026 tanggal 13 April 2026 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2026;
4. Tangkap layar pengisian kinerja Triwulan I pada aplikasi kinerjaku;

5. Nota Dinas Inspektur I Nomor 103/ITJ.1/HP.470/IV/2026 tanggal 16 April 2026 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Inspektorat I Periode Triwulan I Tahun 2026;
6. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan periode Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026;
7. Matrik kepatuhan pelaksanaan PKPT periode Triwulan I Tahun 2026.